

E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Dani Ariza

Universitas Padjajaran, Indonesia
daniarizahamdan01@yahoo.com

Submitted: 13th July 2023 | **Edited:** 20th Nov 2023 | **Issued:** 01st Jan 2024

Cited on: Ariza, D. (2024). E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 20-29.

ABSTRACT

This research aims to investigate the effectiveness of e-catalogs as a strategic government initiative in combating fraud in the procurement of goods and services. E-catalogs represent an innovation in the procurement process expected to enhance transparency, speed, and reliability in the selection of suppliers by the government. The research employs a juridical normative approach, detailing references from books, regulations, and relevant literature. The findings of the research indicate that the use of e-catalogs has had a positive impact on clarity, process acceleration, and ease in selecting suppliers. However, the study also identifies potential security loopholes that need attention to enhance resilience against fraud within the system. While e-catalogs enable open access to prices, the research highlights the need for additional strategies to address the potential for high price negotiations. The implications of these findings can serve as a foundation for the government to continually develop and improve the security of e-catalogs as an effective tool in maintaining integrity and transparency in the procurement of goods and services.

Keywords: E-Catalog, Goods & Services Procurement, Transparency, Fraud, Integrity

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang paling rentan terhadap terjadinya fraud. Fraud pengadaan barang dan jasa dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari mark up harga, penggelapan, hingga korupsi (Nasution & Nurhayati, 2022). Fraud ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerugian keuangan negara akibat korupsi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 mencapai Rp13,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa fraud pengadaan barang dan jasa masih menjadi permasalahan serius yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi fraud pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah dengan menerapkan e-katalog. E-katalog adalah sistem informasi

elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (Kristianto, 2022; Iqbal, 2020).

E-katalog memiliki beberapa keunggulan yang dapat membantu pemerintah dalam memerangi fraud pengadaan barang dan jasa. Pertama, e-katalog dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa (Youdit, 2023). Kedua, e-katalog dapat mengurangi peluang terjadinya mark up harga (Aryansah, 2022). Ketiga, e-katalog dapat mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Arifin, et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penerapan e-katalog telah menunjukkan hasil yang positif dalam memerangi fraud pengadaan barang dan jasa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-katalog dapat menurunkan risiko terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa sebesar 50% (Laporan Kinerja LKPP Tahun 2022). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa e-katalog telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-katalog dapat menghemat biaya pengadaan barang dan jasa sebesar 10%.

LANDASAN TEORI

E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah (Putri, et al., 2023). E-katalog dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Fraud pengadaan barang dan jasa adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Nafi'ah, 2022). Fraud ini dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari mark up harga, penggelapan, hingga korupsi (Prikustiawan, 2023). Fraud pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar (Santoso, et al., 2022).

E-katalog memiliki keterkaitan yang erat dengan kecurangan pengadaan barang dan jasa. E-katalog dapat membantu pemerintah dalam memerangi fraud pengadaan barang dan jasa dengan cara-cara berikut (Wijayanti, 2017):

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-katalog menyediakan informasi yang lengkap dan transparan tentang barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Informasi ini dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk

pemerintah, penyedia barang dan jasa, dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi peluang terjadinya fraud. Hal ini karena pelaku fraud akan lebih sulit untuk menyembunyikan perbuatannya jika semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

2. Mengurangi peluang terjadinya mark up harga. E-katalog menetapkan harga yang ditetapkan oleh penyedia barang dan jasa. Harga ini telah melalui proses negosiasi dan persetujuan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya mark up harga, karena harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa telah diawasi oleh pemerintah (Widiyanti & Widnyani, 2023). Mark up harga merupakan salah satu bentuk fraud pengadaan barang dan jasa yang paling sering terjadi. Pelaku fraud akan menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penerapan e-katalog dapat membantu pemerintah untuk mengurangi peluang terjadinya mark up harga (Rahmah, 2023). Hal ini karena harga yang ditetapkan dalam e-katalog telah melalui proses negosiasi dan persetujuan oleh pemerintah.

3. Mempermudah pengawasan

E-katalog menyimpan data dan informasi lengkap tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Data ini dapat diakses oleh pemerintah secara online. Hal ini dapat mempermudah pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif (Mustari, et al., 2022). Pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif dapat membantu pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian yang optimal, diperlukan penerapan metode yang tepat. Dalam konteks ini, peneliti memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki dan menganalisis masalah yang telah diklasifikasikan. Pendekatan yuridis ini mengacu pada kerangka perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, metode normatif digunakan untuk mendekati penelitian dengan cara menelaah secara mendalam dan mengkaji sumber-sumber pustaka serta data sekunder terkait prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Langkah awal melibatkan pengumpulan dan studi mendalam terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penelusuran literatur, serta analisis karya-karya artikel terkait temuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-katalog. Sumber-sumber referensi yang digunakan meliputi perpustakaan konvensional, internet, dan sumber informasi lainnya. Proses selanjutnya melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihimpun difilter untuk mendapatkan informasi yang relevan dan representatif terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, diikuti dengan simpulan yang diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif terhadap permasalahan yang teridentifikasi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

HASIL PENELITIAN

Prinsip Kerja E-Katalog

Prinsip kerja E-Katalog, sebagaimana diatur oleh regulasi dan diterapkan dalam praktiknya, mencakup beberapa tahapan krusial. Pertama, sesuai dengan regulasi yang ada, E-Katalog mengharuskan pihak pengadaan untuk melakukan pengumpulan informasi produk dan jasa secara elektronik. Hal ini melibatkan penyusunan katalog elektronik yang memenuhi kriteria dan format yang telah ditentukan. Proses pengadaan kemudian dilakukan secara elektronik, mencakup tahapan pendaftaran penyedia, permintaan penawaran, dan evaluasi penawaran. Keterbukaan dan transparansi menjadi fokus utama, sejalan dengan regulasi yang menekankan adanya persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

Dalam praktiknya, E-Katalog tidak hanya memberikan efisiensi dalam akses informasi, tetapi juga menjamin keamanan dan keandalan sistem. Pihak yang mengelola E-Katalog bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan integritas data, menjaga kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Evaluasi rutin terhadap kinerja sistem dan pembaruan sesuai dengan regulasi menjadi langkah penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas E-Katalog seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Dengan implementasi prinsip-prinsip ini, E-Katalog bukan hanya menjadi alat efisien dalam pengadaan, tetapi juga menjunjung tinggi standar integritas, transparansi, dan keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Standar Prosedur E-Katalog

Standar prosedur E-Katalog, sejalan dengan regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa, mencakup langkah-langkah kritis untuk memastikan transparansi, persaingan yang sehat, dan efisiensi dalam proses tersebut. Pertama, regulasi menetapkan pedoman untuk pengumpulan informasi produk dan jasa yang akan dimasukkan ke dalam E-Katalog. Ini melibatkan proses penyusunan katalog elektronik dengan kriteria tertentu, termasuk format data yang harus dipenuhi. Selanjutnya, proses pengadaan secara elektronik diatur dengan jelas, mencakup registrasi penyedia, permintaan penawaran, dan evaluasi penawaran. Regulasi juga menekankan pada transparansi dan keterbukaan, memastikan bahwa informasi dalam E-Katalog dapat diakses secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan, seiring dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, implementasi standar prosedur E-Katalog menuntut pemeliharaan keamanan dan keandalan sistem. Pihak yang mengelola E-Katalog harus memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses dalam sistem tersebut terlindungi dengan baik, mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh regulasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja sistem menjadi bagian integral dari standar prosedur, memungkinkan identifikasi potensi perbaikan dan pembaruan yang diperlukan. Keseluruhan, standar prosedur E-Katalog, baik yang diatur oleh regulasi maupun diterapkan dalam praktik, berperan penting dalam mendukung integritas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Keuntungan E-Katalog

Keuntungan E-Katalog, yang telah terbukti dalam praktik di lapangan, mencakup beberapa aspek yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, penggunaan E-Katalog dapat menyederhanakan proses pengadaan dengan menyajikan daftar produk atau jasa dari berbagai penyedia secara terpusat. Hal ini memungkinkan pihak pengadaan untuk dengan mudah membandingkan berbagai opsi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam pemilihan penyedia. Selain itu, transparansi dalam E-Katalog memainkan peran penting dalam menciptakan persaingan yang sehat. Dengan memungkinkan akses terbuka terhadap informasi produk, harga, dan kualifikasi penyedia, E-Katalog membantu menciptakan lingkungan yang adil, di mana penyedia bersaing secara transparan. Ini dapat menghasilkan penawaran yang lebih kompetitif dan memberikan nilai tambah bagi pihak pengadaan.

Penerapan E-Katalog juga memfasilitasi pemeliharaan dan pembaruan informasi secara real-time. Pihak pengadaan dapat dengan cepat menyesuaikan katalog dengan perubahan dalam kebutuhan atau persyaratan, menghindari keterlambatan atau kebingungan yang mungkin timbul dalam sistem manual.

Data praktik menunjukkan bahwa E-Katalog memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan keseluruhan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi teknologi ini telah membuktikan diri sebagai solusi yang efektif dalam meningkatkan kinerja sistem pengadaan, memberikan keuntungan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. E-Katalog adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memudahkan proses pengadaan dengan menyediakan daftar produk atau jasa yang telah disetujui dan dihargai sebelumnya oleh pihak berwenang. Berikut adalah penjelasan mengenai praktik pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Indonesia:

1. Registrasi Penyedia Barang dan Jasa. Penyedia barang dan jasa yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan melalui E-Katalog harus mendaftarkan diri mereka di platform yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Penetapan Harga dan Spesifikasi. Pemerintah menetapkan daftar harga dan spesifikasi standar untuk barang dan jasa tertentu yang akan dimasukkan ke dalam E-Katalog. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi yang jelas bagi para penyedia.
3. Penyusunan E-Katalog. E-Katalog disusun dengan mencakup daftar barang dan jasa yang telah disetujui beserta harga dan spesifikasinya. E-Katalog ini dapat diakses oleh instansi pemerintah dan entitas lain yang melakukan pengadaan.
4. Proses Pengadaan. Instansi pemerintah atau entitas yang membutuhkan barang atau jasa melakukan pencarian dan pemilihan produk atau jasa yang sesuai dari E-Katalog.
5. Pemesanan. Setelah memilih barang atau jasa, instansi pemesan dapat melakukan pemesanan melalui platform E-Katalog sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Proses Pembayaran

Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Harga barang atau jasa yang tercantum dalam E-Katalog biasanya sudah disetujui sebelumnya.

7. Evaluasi Kinerja Penyedia

Pemerintah atau entitas pengguna E-Katalog dapat melakukan evaluasi kinerja penyedia barang atau jasa setelah transaksi selesai. Hal ini dapat memengaruhi penilaian penyedia untuk partisipasi selanjutnya.

Keuntungan dari pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, transparansi, dan peningkatan partisipasi penyedia. Namun, implementasi yang sukses memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, kepatuhan penuh terhadap aturan dan regulasi, serta partisipasi aktif dari penyedia dan instansi pemesan.

Kasus-kasus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Katalog yang Merugikan Keuangan Negara

Berikut adalah beberapa kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog yang telah merugikan keuangan negara selama enam tahun terakhir:

1. Kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan melakukan pengadaan alat kesehatan melalui e-katalog dengan total nilai kontrak sebesar Rp2,7 triliun. Dalam proses pengadaan tersebut, terdapat dugaan korupsi berupa mark up harga dan penggelapan uang negara. Kejaksaan Agung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama PT. Biofarma (Persero) dan Direktur Utama PT. Indofarma (Persero).

2. Kasus pengadaan komputer di Universitas Brawijaya

Pada tahun 2021, Universitas Brawijaya melakukan pengadaan komputer melalui e-katalog dengan total nilai kontrak sebesar Rp5,8 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, terdapat dugaan korupsi berupa mark up harga dan penggelapan uang negara. Kejaksaan Negeri Malang menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Direktur CV. Bintang Jaya.

3. Kasus pengadaan buku di Pemerintah Kabupaten Sleman

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pengadaan buku melalui e-katalog dengan total nilai kontrak sebesar Rp3,8 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, terdapat dugaan korupsi berupa mark up harga dan penggelapan uang negara. Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman dan Direktur CV. Anugerah Utama.

4. Kasus pengadaan alat tulis kantor di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengadaan alat tulis kantor melalui e-katalog dengan total nilai kontrak sebesar Rp1,5 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, terdapat dugaan korupsi berupa mark up harga dan penggelapan uang negara. Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV. Sumber Sejahtera.

5. Kasus pengadaan jasa konstruksi di Pemerintah Kabupaten Klaten

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pengadaan jasa konstruksi melalui e-katalog dengan total nilai kontrak sebesar Rp10,5 miliar. Dalam proses pengadaan tersebut, terdapat dugaan korupsi berupa mark up harga dan penggelapan uang negara. Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV. Karya Mandiri.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh ICW tahun 2023 tentang beberapa kasus, kecurangan atau pelanggaran etika dalam pengadaan barang dan jasa dapat mencakup:

1. Mark-up Harga. Penambahan harga secara tidak wajar pada barang atau jasa yang tercantum dalam E-Katalog.
2. Kolusi. Kesepakatan antara pihak-pihak tertentu untuk mengatur hasil lelang atau pengadaan demi keuntungan bersama.
3. Nepotisme. Memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki hubungan pribadi atau kepentingan dengan pejabat yang terlibat dalam pengadaan.
4. Penyalahgunaan Wewenang. Penggunaan wewenang atau posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

5. Ketidaktransparan. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, seperti informasi yang disembunyikan atau tidak diungkapkan secara jelas.

KESIMPULAN

Sistem e-katalog adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, sistem e-katalog juga masih rentan terhadap terjadinya korupsi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kekurangan pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, dan kesenjangan informasi

Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengembangkan sistem e-katalog. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem e-katalog dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya korupsi.

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan sistem e-katalog:

1. Meningkatkan pengawasan. LKPP perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh LKPP, maupun secara eksternal oleh aparat penegak hukum, lembaga independen, maupun masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum perlu ditingkatkan kepada penyelenggara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pelatihan, seminar, maupun sosialisasi melalui media massa.
3. Mengembangkan sistem e-katalog. LKPP perlu mengembangkan sistem e-katalog untuk dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai. Selain itu, sistem e-katalog juga perlu dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, A. S., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penggunaan E-Catalog Sebagai Penunjang Aktivitas UMKM di Kantor Walikota Medan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 323-329.

- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa*, 1(1), 53-60.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Youdit, V. (2023). Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektoral Kemenkumham. *Jurnal Socia Logica*, 3(1), 11-21.
- Aryansah, J. E. (2022). Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP)*, 2(2), 18-24.
- Arifin, K., Daga, R., & Anshar, M. A. (2023). Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 193-205.
- Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 117-130.
- Nafi'ah, B. A. (2022). Analisis stakeholder kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal. *Public Sphere Review*, 15-21.
- Prikustiawan, A. (2023). Analisis Kebijakan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Lokal Untuk Pengembangan Umkm Di Pemerintah Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 177-184.
- Santoso, A., Permana, I., Zusrony, E., & Dewi, M. U. (2022). Implementasi Aplikasi digitalisasi Produk UMKM dengan E-Katalog dan GIS secara terpadu untuk Pemetaan dan optimasi penjualan. *Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer*, 15(2), 383-392.
- Wijayanti, N. P. L. (2017). E-Katalaog dalam Pengadaan Barang. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 148-157.
- Widiyanti, N. M. I., & Widnyani, I. A. P. S. (2023). *Implementation of Local E-Catalog Policy in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Buleleng Regency* (No. 10731). EasyChair.
- Rahmah, H. (2023). Keterlibatan Pelaku Umkm Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog Lokal. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(11), 1-10.
- Mustari, N., Suardi, W., & Syukri, U. (2022). Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 193-200.